



JPKN:
Jurnal Pendidikan dan
Kebudayaan Nusantara

E-ISSN: 2963-0746
P-ISSN: 2963-0738

<https://dinastires.org/JPKN> dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jpkn.v2i1>

Received: 5 Januari 2024, Revised: 10 Januari 2024, Published: 15 Januari 2024
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Model Implementasi Kurikulum di Sekolah Pendidikan Inklusif di Kota Bandung

Dede Suryana¹, R. Jusdijachlan², S. Ridwan³

¹Universitas Winaya Mukti, Jawa Barat, Indonesia, febunwim@gmail.com

²Universitas Winaya Mukti, Jawa Barat, Indonesia, yusdi2008@gmail.com

³Universitas Winaya Mukti, Jawa Barat, Indonesia, bang.yonas71@gmail.com

Corresponding Author: yusdi2008@gmail.com²

Abstract: Dede Suryana, 2018, "Curriculum Implementation Model in Inclusive Education Schools in Bandung City." Thesis for the Graduate Program in the Master of Management Study Program at Winaya Mukti University, under the supervision of Dr. H. Nandan Limakrisna, Ir., MM, and Mr. Deden Komar Priatna, ST., S.IP., MM., CHRA. This research aims to provide a general overview of the curriculum implementation model in schools that offer inclusive education, focusing on: a) alignment/modification of the curriculum for students with special needs, b) learning implementation, c) impact, d) parents' responses, and e) supporting and inhibiting factors for implementing inclusive education. This research was conducted using a descriptive method with a qualitative approach at SDN 206 Putraco Indah, an inclusive education school in Bandung City. The researcher collected data through interviews, observations, and document studies. There were seven respondents. Data validation was performed using source and method triangulation. The research findings are: a) the school has aligned the curriculum by modifying it, synchronizing it through identifying, ensuring, and developing individual learning programs in discussions with parents, homeroom teachers, and the principal. b) The learning implementation at this school has adapted the delivery of materials and assessment of learning outcomes. c) The implementation of inclusive education has had a positive impact on all students. d) Parents have responded positively and supported inclusive education. e) Supporting factors for inclusive education include policy as a foundation, leadership support, peer support, parental support, and competent human resources. Inhibiting factors are incomplete understanding of policies, limited funds, and a shortage of special assistant teachers.

Keywords: Inclusive education, modified curriculum.

Abstrak: Dede Suryana, 2018, "Model Implementasi Kurikulum pada Sekolah Pendidikan Inklusif di Kota Bandung". Skripsi Program Pascasarjana Universitas Winaya Mukti Program Studi Magister Manajemen di bawah Bimbingan Dr. H. Nandan Limakrisna, Ir., MM dan Bapak Deden Komar Priatna, ST., S.IP., MM., CHRA Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran umum tentang model implementasi kurikulum di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif terkait dengan a) penyesuaian/modifikasi kurikulum untuk peserta didik berkebutuhan khusus, b) pelaksanaan pembelajaran, c) dampak, d) respon orang tua peserta didik, dan e) faktor pendukung

dan penghambat implementasi pendidikan inklusif. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif, dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan di SDN 206 Putraco Indah sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusi di Kota Bandung. Peneliti menggali data dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan studi dokumen. Responden berjumlah 7 responden. Validasi data dilakukan dengan menggunakan triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian ini adalah: a) sekolah telah menyelaraskan kurikulum, dengan melakukan modifikasi kurikulum telah melakukan sinkronisasi kurikulum dengan mengidentifikasi dan memastikan, mengembangkan program pembelajaran individual – diskusi dengan orang tua, wali kelas, dan kepala sekolah. b) pelaksanaan pembelajaran di sekolah ini telah melakukan penyesuaian pada pemberian materi dan evaluasi hasil belajar. c) pelaksanaan pendidikan inklusif memberikan dampak positif pada seluruh siswa. d) orang tua memberikan respon positif dan dukungan terhadap pendidikan inklusi. e) faktor yang mendukung pendidikan inklusi adalah kebijakan sebagai landasan, dukungan pimpinan, rekan sejawat, orang tua siswa, dan sumber daya manusia yang kompeten. Faktor penghambat adalah kebijakan yang masih belum dipahami secara menyeluruh, minimnya dana, dan minimnya jumlah guru pendamping khusus.

Kata Kunci: Inklusif pendidikan, kurikulum modifikasi.

PENDAHULUAN

Tujuan utama pendidikan yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bab 2 pasal 3 adalah: "Mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab".

Pendidikan harus mampu meningkatkan kualitas manusia seutuhnya, melalui hasil, pemikiran, rasa, dan latihan agar memiliki daya saing dalam menghadapi masa depan, begitu pula pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, pemerintah telah mengaturnya dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 pasal 5 ayat (2) yaitu: "Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus."

Perubahan paradigma dalam pendidikan khusus, termasuk pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, dari segregasi ke inklusi kini mengharuskan anak berkebutuhan khusus diberi kesempatan seluas-luasnya untuk belajar, bermain, bekerja, dan bergaul dalam masyarakat pada umumnya sesuai dengan keadaan mereka. Pendidikan segregatif adalah sistem pendidikan terpisah, yang memisahkan pendidikan bagi siswa cerdas dan rata-rata dari siswa berkebutuhan khusus.

Sedangkan pendidikan diperuntukkan bagi seluruh masyarakat tanpa kecuali dan tidak membedakan individu, hak atas pendidikan tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28c Ayat (1) dan tercantum pula dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 5 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa pemerintah menjamin pendidikan bagi semua peserta didik tanpa membedakan ras, agama, suku, jenis kelamin, keterbatasan fisik, dan mental.

Pendidikan inklusif dinilai baik karena selain memanusiakan manusia, pendidikan inklusif yang dilaksanakan di Indonesia diharapkan mampu pemeratakan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dimana anak berkebutuhan khusus tidak harus bersekolah di sekolah luar biasa untuk mendapatkan layanan pendidikan karena jumlah sekolah luar biasa tidak sebanyak sekolah reguler, sehingga anak berkebutuhan khusus dapat mencari sekolah terdekat dan mudah dijangkau oleh anak berkebutuhan khusus, sehingga pemerataan pendidikan dan layanan pendidikan bagi seluruh anak Indonesia dapat terpenuhi. Pendidikan inklusif juga merupakan bentuk realisasi dari Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak yang menjamin setiap anak memperoleh akses pendidikan dan pelatihan yang bermutu tanpa diskriminasi.

Dampak positif dari penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah dapat membuat anak penyandang disabilitas merasa lebih diterima di masyarakat dan dihargai, tidak hanya itu saja, ketika siswa reguler memiliki teman atau lingkungan sosial dengan anak penyandang disabilitas, mereka belajar bagaimana bersikap toleran dan menghargai serta membantu teman yang memiliki keterbatasan (McMurray, 2016).

Hasil diskusi peneliti dengan supervisor dinas pendidikan kota Bandung, kepala sekolah dan guru pelaksana pendidikan inklusi, serta organisasi sosial masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan inklusi menyampaikan beberapa kendala yang sering dialami oleh sekolah baik yang menyelenggarakan pendidikan inklusi maupun yang belum atau sedang menuju pendidikan inklusi. Beberapa kendala yang sering dihadapi seperti kurangnya pemahaman dari para pendidik dan masyarakat tentang pendidikan inklusi sehingga membuat pendidikan inklusi berjalan kurang baik dan dapat menimbulkan penolakan dari pihak sekolah, faktor dana juga menjadi kendala bagi sekolah, karena dana untuk memberikan layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus tidaklah sedikit, Tenaga pendidik yang belum siap dan tidak menerima sistem pendidikan inklusi, sering kali merasa terbebani karena harus menampung dan mengelola kelas dengan keberagaman peserta didik yang sangat berjauhan kemampuannya, dan juga tidak semua guru mampu mengatasi berbagai kendala yang dimiliki peserta didik.

Pengembangan kurikulum untuk kelas inklusif memiliki karakteristik tersendiri, dimana kurikulum nasional tetap menjadi kurikulum yang diterapkan di kelas, namun karena berbagai kemampuan dan hambatan yang dimiliki peserta didik, maka diperlukan modifikasi atau penyesuaian kurikulum nasional agar kurikulum tersebut dapat diakses dan melibatkan semua peserta didik, serta menghasilkan kemajuan dalam pembelajaran (Friend & Burstuck, 2015). Modifikasi kurikulum atau yang dikenal juga dengan kurikulum adaptif merupakan kurikulum yang digunakan di kelas inklusif yang peserta didiknya berkebutuhan khusus harus dilayani dengan kurikulum yang sesuai (Harriott, 2004; Richards & Doole, 2015). Sejalan dengan hal tersebut, Suhendar (2017) menyampaikan bahwa kurikulum pembelajaran yang diterapkan pada setting kelas inklusif tidak dapat disamakan dengan pembelajaran umum, melainkan perlu ada modifikasi agar sesuai dengan kebutuhan siswa.

Berdasarkan beberapa kendala yang timbul dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, maka peneliti tertarik untuk meneliti “MODEL IMPLEMENTASI KURIKULUM PADA SEKOLAH PENDIDIKAN INKLUSIF DI KOTA BANDUNG”.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (Moleong, 2017), sehingga data yang diperoleh merupakan data deskriptif untuk menjelaskan suatu fenomena atau kejadian yang wajar sesuai dengan kondisi yang ada tanpa dipengaruhi oleh apapun. Penelitian ini dilakukan dalam lingkup dinas pendidikan kota Bandung, dengan menggunakan purposive sampling yaitu sampel yang ditentukan dengan tujuan tertentu. “Salah satu ciri pengambilan sampel dalam penelitian kualitatif adalah purposive sampling karena sampel bertujuan untuk menggali informasi dan merinci kekhususan tema penelitian sehingga tidak mungkin dilakukan sampel secara acak” (Moleong, 2017, hlm. 224).

Sampel ini memiliki kriteria sekolah yang memiliki rata-rata 3 PDBK pada setiap kelas, memiliki guru pendamping khusus dan telah menyelaraskan kurikulum. Kekhususan objek penelitian ini menggunakan sekolah piloting project sehingga peneliti mengambil 3 sekolah yaitu, SDN Tunas Harapan, SDN 138 Gerlong, dan SDN 206 Putraco Indah. dalam hal pengumpulan informasi atau data dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif diantaranya menggunakan teknik wawancara, observasi dan studi dokumen. Melalui

ketiga teknik pengumpulan data tersebut dihasilkan tiga instrumen yang berbeda, ketiga instrumen tersebut dilakukan validasi baik validasi isi maupun validasi konstruk yang dilakukan oleh para ahli atau expert judgement. Melalui validasi ahli, instrumen dapat menggali data yang tepat sesuai dengan topik penelitian.

Analisis data dilakukan secara terus menerus baik ketika masih dalam tahap pengumpulan data, maupun setelah data terkumpul secara lengkap. Dalam menganalisis data menurut Miles dan Huberman (dalam Ali, 2014) agar data tersebut memberikan makna, melalui langkah-langkah sebagai berikut: a) Reduksi Data; b) Penyajian Data; dan terakhir c) Kesimpulan dan Verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelarasan Kurikulum

Tabel 1 Tahapan Penyelarasan Kurikulum

Pangg ung	Bahasa Indonesia: Westwood (tahun 2005)	Teman & Bursuck (tahun 2015)	Kitano dan Kirby di Mulyono Abdurrahman (tahun 2012)	Di Lapangan
1	Memilih mata pelajaran atau topik yang akan diajarkan	Mengidentifikasi Tuntutan Kelas	Membentuk tim IEP	Membentuk tim untuk menyelaraskan kurikulum
2	Mengidentifikasi konten spesifik yang dapat disertakan	Catatan Murid Sedang belajar Kekuatan dan Kebutuhan	Menilai kebutuhan anak	Mengidentifikasi peserta didik
3	Mengembangkan tujuan pembelajaran untuk sebagian besar peserta didik di kelas	Periksa potensinya Daerah dari Keberhasilan Siswa	Mengembangkan tujuan jangka panjang dan jangka pendek	Penilaian
4	Memutuskan bagaimana pelajaran akan diselenggarakan dan dilaksanakan untuk sebagian besar peserta didik	Lihat untuk Area Masalah Potensial	Merancang metode dan prosedur untuk mencapai tujuan	Penyusunan program tahunan PDBK.
5	Mengidentifikasi peserta didik yang memerlukan modifikasi pada format pelajaran umum	Menggunakan Informasi untuk Brain Stom Cara untuk Instruksi Bedakan	Menentukan metode evaluasi untuk melihat kemajuan anak	Pengembangan PPI
6	Ubah tujuan untuk peserta didik, jika diperlukan	Bedakan Instruksi		Konsolidasi
7	Siapkan adaptasi apa pun yang diperlukan	Mengevaluasi Murid Kemajuan		Evaluasi
8	Ajarkan pelajaran, dan buat perubahan tambahan yang diperlukan saat mengajar			

9	Memberikan dukungan tambahan kepada pelajar tertentu saat pelajaran sedang berlangsung			
10	Merencanakan metode yang tepat untuk menilai pembelajaran siswa berdasarkan tujuan dan sasaran			

Jika dibandingkan dengan 3 model yang ada, model pengembangan kurikulum yang diuraikan oleh Westwood dan Friend & Bursuck tidak secara eksplisit memperlihatkan keterlibatan pakar atau tim dalam penyelarasan kurikulum karena penyelarasan kurikulum di kelas dilakukan oleh guru kelas yang berkompeten untuk melakukan penyelarasan kurikulum dibantu oleh GPK untuk memberikan masukan terkait layanan pembelajaran yang tepat bagi PDBK. Kedua model tersebut secara tidak langsung menjelaskan adanya keterlibatan atau guru berkolaborasi dengan pakar atau tim untuk menyelaraskan kurikulum. Di sisi lain, ada pula model yang diawali dengan membentuk tim khusus seperti yang dilakukan di sekolah yang diteliti, dengan dibentuknya tim untuk melakukan modifikasi kurikulum, maka dapat diketahui bahwa salah satu tanggung jawab GPK adalah melakukan penyelarasan kurikulum. GPK terlibat penuh sejak awal proses pengembangan kurikulum sampai dengan membimbing PDBK di kelas dan membuat laporan akhir pembelajaran. Persamaan dari semua model tersebut adalah penyelarasan/modifikasi kurikulum dilakukan berdasarkan hasil identifikasi dan penilaian.

Jika dibandingkan dengan masing-masing tahapan model penyelarasan/modifikasi kurikulum di atas, pelaksanaan penyelarasan kurikulum di lapangan sudah cukup baik, dengan menyesuaikan kebutuhan dengan sumber daya dan kemampuan yang ada pada masing-masing tahapan merupakan upaya untuk dapat menghasilkan kurikulum yang berorientasi pada PDBK. Secara teknis, GPK sebagai tim pengembang kurikulum merasakan bahwa pengembangan kurikulum untuk PDBK masih belum mantap dari segi format dan laporan pertanggungjawaban. Laporan dokumentasi tidak ditagih oleh pengawas atau dinas setempat, menyebabkan format dan laporan dokumentasi kurikulum disesuaikan dengan sumber daya manusia yang ada di sekolah tanpa adanya format atau persyaratan dokumen apa saja yang perlu disusun, menyebabkan pula bagi sekolah yang tidak mengembangkan modifikasi kurikulum untuk PDBK merasa belum merupakan suatu keharusan.

Implementasi Pembelajaran

Pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan di kelas inklusif menjadi unik dengan adanya PDBK dan kurikulum yang berbeda antara PDBK dengan reguler. Pelaksanaan pembelajaran di kelas tetap melibatkan seluruh siswa, semua siswa terlibat di dalamnya dan tidak ada perbedaan, keberagaman merupakan salah satu keunikan yang ada di kelas setting inklusif. Diketahui bahwa pembelajaran yang terjadi di kelas, pada awal pembelajaran seluruh peserta didik bersama-sama memperhatikan guru kelas secara kalkulatif dan kemudian ketika terjadi perbedaan materi guru kelas memberikan materi yang lebih sederhana atau PDBK dipandu oleh GPK di kelas secara individual. Pemberian tugas atau kegiatan kelompok akan selalu melibatkan PDBK yang disesuaikan dengan porsinya masing-masing.

Pembelajaran untuk PDBK tidak hanya difokuskan pada bidang akademik saja, bagi sekolah yang telah memiliki GPK dan mampu mengembangkan program PDBK difokuskan pada pengembangan kemandirian, sosial, minat dan bakat serta swadaya untuk mengurangi hambatan yang dimiliki oleh siswa berkebutuhan khusus. Sedangkan sekolah pertama yang

belum memiliki program tersebut, pelaksanaan kurikulumnya hanya sebatas pengembangan akademik saja dan untuk pengembangan lainnya mengandalkan keaktifan orang tua siswa PDBK untuk mengarahkan ke terapi, psikolog, dan kegiatan pendukung lainnya. Berikut ini adalah beberapa modifikasi yang dilakukan sekolah dalam melaksanakan pembelajaran dari beberapa aspek.

a). Materi Pembelajaran, Di SDN 206 Putraco Indah, materi pembelajaran yang diberikan kepada PDBK adalah materi dengan topik atau tema yang sama tetapi disederhanakan, dengan kata lain indikatornya dibedakan, sedangkan materi yang diberikan bisa sama dengan teman sekelasnya tetapi bisa juga menggunakan materi yang jauh di bawah teman sekelasnya. Modifikasi materi dilakukan dengan melihat kemampuan akademik PDBK, wali kelas menilai kemampuan kognitif PDBK, sejauh mana materi yang dapat diterima. Wali kelas mencatat kedalaman materi yang mampu diselesaikan PDBK dalam jurnal harian, sedangkan GPK mencatat setiap materi yang diterima PDBK dan memetakan materi yang sudah atau belum diselesaikan, sehingga guru dan orang tua dapat melihat perkembangannya. Berdasarkan catatan tersebut, guru atau GPK melanjutkan memberikan materi selanjutnya.

b). Media Pembelajaran, Media yang digunakan di sekolah selama ini masih menggunakan media yang sama dengan media regular. Hanya saja pada beberapa kesempatan GPK terkadang membawa media berupa gambar-gambar yang diberikan kepada PDBK untuk memberikan gambaran yang lebih konkrit tentang materi yang diajarkan, penggunaan media seperti membawa tanaman, alat peraga selain membantu PDBK juga membantu siswa regular agar lebih memahami materi yang diajarkan.

c). Metode Pembelajaran, Metode pembelajaran merupakan suatu cara penyampaian materi kepada peserta didik. Pada umumnya pihak sekolah menggunakan metode yang sama dengan peserta didik regular yaitu ceramah, tanya jawab, tugas dan praktik, dengan menggunakan pendekatan saintifik, namun untuk PDBK guru juga menggunakan metode tutor sebaya. Dimana peserta didik regular duduk bersama PDBK dan membantu PDBK dalam belajar. Tutor sebaya merupakan salah satu metode yang sering digunakan dalam setting kelas inklusif karena memberikan dampak positif tidak hanya pada aspek akademis saja, tetapi juga sosial dan sikap (Bolich, 2001; Frederickson & Cline, 2009; Mallon, 2005) yang terjadi pada peserta didik regular dan PDBK. Pada aspek akademis, peserta didik regular sekaligus mengulang materi dan memahami kembali, sedangkan untuk PDBK dapat memahami dengan cara yang sederhana karena materi disampaikan oleh teman. Di sisi lain, terbentuk sikap saling membantu dan menolong serta menumbuhkan rasa pengertian bagi peserta didik regular.

d). Evaluasi Pembelajaran, Penilaian autentik sangat tepat diterapkan untuk PDBK. Instrumen evaluasi pembelajaran sama dengan penilaian akademik biasa berupa soal tertulis atau soal lisan, sedangkan penilaian sikap dan kinerja menggunakan jurnal sikap. SDN 206 Putraco Indah mengembangkan instrumen evaluasi sampai dengan pelaksanaannya dilakukan oleh wali kelas dan dibantu oleh GPK dengan menyederhanakan materi dan jawaban serta membantu membacakan soal-soal untuk sebagian PDBK, sedangkan pengembangan instrumen evaluasi PDBK dikembangkan oleh GPK, dan pelaksanaan evaluasi PDBK juga dibimbing oleh GPK. Pendampingan yang diberikan pada saat pelaksanaan ujian PDBK seperti membantu membacakan soal agar siswa lebih memahami maksud dari soal, apabila siswa tidak dapat mengeja maka dibantu untuk mendiktekan jawaban yang telah dipanggil oleh siswa.

e). Kolaborasi Guru, Selama 20 tahun terakhir teknik kolaborasi telah menjadi landasan praktik pendidikan inklusif yang digunakan untuk mengembangkan dan meninjau rencana pendidikan individual, untuk pemecahan masalah instruksional, sebagai media keterlibatan dengan orang tua dan oleh berbagai profesional yang melayani siswa dengan kebutuhan inklusif (Lancaster, 2014). Kolaborasi antara guru, GPK, kepala sekolah dan orang tua sangat baik dan mendukung penerapan pendidikan inklusif. Ketika di kelas guru dan GPK saling mengetahui tugas dan fungsi masing-masing dan koordinasi yang baik menciptakan suasana kekeluargaan dengan

satu tujuan pendidikan. Tanpa tujuan bersama, program dapat terbagi dan tidak komprehensif (Giangreco, 1997).

Melalui hasil penelitian bahwa sekolah SDN 206 Putraco Indah melakukan penyesuaian pembelajaran pada komponen, materi dan evaluasi pembelajaran. Modifikasi kurikulum pada tahap implementasi dilakukan dengan menyesuaikan kemampuan siswa. Keterlibatan PDBK dalam pembelajaran di kelas juga sudah sangat baik dengan cara terlibat aktif dalam kelompok dan memperhatikan pembelajaran yang diberikan. Sebagaimana yang tercantum dalam pedoman penyelenggaraan pendidikan inklusi yang dikeluarkan oleh Direktorat PKLK bahwa terdapat 5 model kurikulum, dalam implementasinya dapat menggunakan satu atau lebih model kurikulum yang sudah ada, tidak hanya bertumpu pada satu model saja.

Pelaksanaan pembelajaran mengacu pada program tahunan dan PPI yang telah disusun. Perencanaan pembelajaran berperan dalam menjabarkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh peserta didik, serta menentukan metode, media, sumber belajar, sarana dan prasarana yang tepat untuk menciptakan pengalaman belajar yang tepat bagi peserta didik dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran (Hamalik, 2013).

Dampak

McMurray et al. (2016) melalui kehadiran peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah reguler memberikan dampak positif baik bagi peserta didik reguler maupun bagi PDBK itu sendiri. Seperti yang ditemukan di sekolah bahwa bagi peserta didik reguler, dampaknya bersifat sosial dan sikap lebih teras, seperti lebih mampu berempati, bersyukur, menerima kekurangan dan keberagaman yang ada, saling memahami dan saling membantu serta tidak menganggap aneh ketika bertemu dengan orang yang memiliki kendala atau berkebutuhan khusus. Dampak lainnya juga dirasakan oleh sebagian peserta didik reguler, dimana adanya rasa tidak nyaman dengan PDBK yang dianggap mengganggu.

Bagi PDBK juga ada dampak seperti peningkatan prestasi akademik, bahkan ada PDBK yang mampu mengikuti USBN. Sementara itu, pada aspek nonakademik, rasa percaya diri meningkat karena penerimaan yang dirasakan di sekolah sehingga secara sosial juga meningkat. Ada pula peningkatan rasa tanggung jawab dan pemahaman terhadap kehidupan bermasyarakat. Guangreco (1997, p. 202) juga menyebutkan dampak terhadap pelaksanaan pendidikan inklusif sebagai berikut:

a) Dampak pada siswa berkebutuhan khusus: Program pendidikan yang lebih relevan dan terfokus, Akses yang lebih luas ke lingkungan yang umum (misalnya sekolah, masyarakat, pekerjaan), Akses ke pengalaman/pekerjaan baru di sekolah dan di luar sekolah, Akses ke model teman sebaya, Hubungan dan persahabatan baru, Harapan yang lebih tinggi, Kesadaran dan daya tanggap yang lebih tinggi terhadap aktivitas di lingkungan masyarakat, Penguasaan keterampilan yang lebih tinggi, Kenikmatan yang lebih besar di sekolah.

b) Dampak pada peserta didik tanpa disabilitas: Meningkatnya apresiasi terhadap keberagaman manusia, Meningkatnya daya tanggap terhadap kebutuhan orang lain, dengan dan tanpa disabilitas, Meningkatnya kenyamanan dalam berinteraksi dengan orang-orang penyandang disabilitas, Hubungan dan persahabatan baru, Pertumbuhan sosial/emosional, Tidak mengganggu kualitas pendidikan mereka (misalnya, prestasi akademik), Memberikan kesempatan untuk memecahkan masalah dalam kehidupan nyata, Mengembangkan etika/nilai kepedulian dan komitmen terhadap orang lain, Tercermin dalam cara yang mengarah pada pertumbuhan pribadi.

Dampak nonakademik memang makin terasa, baik oleh PDBK maupun peserta didik reguler, dan tidak dapat dipungkiri bahwa dampak positif inilah yang menjadi alasan mengapa sistem pendidikan inklusif perlu diimplementasikan secara lebih serius sebagai sistem pendidikan nasional.

Tanggapan orang tua peserta didik

Keluarga merupakan bagian dari tim kolaboratif dan penting untuk berinteraksi dan berdiskusi dengan keluarga (Davern, 1996; Salend & Duhaney, 2001; Yssel et al., 2007). Karena keluarga merupakan lingkungan pertama yang merasakan dampak layanan pendidikan dan dukungan yang diberikan oleh sekolah, alasan mengapa keluarga harus terlibat penuh dalam pendidikan didasarkan pada asumsi berikut (Giangreco et al., 1993): (a) keluarga mengetahui aspek-aspek tertentu dari anak mereka lebih baik daripada orang lain, (b) keluarga memiliki kepentingan terbesar dalam melihat anak mereka belajar, (c) keluarga cenderung menjadi satu-satunya kelompok orang dewasa yang terlibat dengan program pendidikan anak selama masa sekolahnya, (d) keluarga memiliki kemampuan untuk memengaruhi kualitas layanan pendidikan yang diberikan di komunitas mereka secara positif, dan (e) keluarga harus hidup dengan hasil keputusan yang dibuat oleh tim pendidikan sepanjang hari, setiap hari. Dengan demikian, respons orang tua terhadap sekolah memiliki arti penting dalam pembelajaran.

Diketahui bahwa orangtua PDBK sengaja menyekolahkan anaknya di sekolah inklusi dengan alasan anak mereka tidak mendapatkan pelayanan yang baik di sekolah yang tidak menyelenggarakan pendidikan inklusi dan bagi sebagian PDBK dianjurkan oleh para psikolog untuk bersekolah di sekolah inklusi karena jika sekolahnya di SLB siswa dapat mengalami kemunduran baik sikap, mental, maupun kognitif. Alasan dekat dengan tempat tinggal juga menjadi salah satu alasannya, namun jika dilihat dari data banyak orangtua anak berkebutuhan khusus yang menyekolahkan anaknya di sekolah inklusi padahal jauh dari tempat tinggalnya karena sekolah di sekitar rumah mereka menolak anak berkebutuhan khusus.

Orang tua peserta didik reguler mengapresiasi dan mendukung pelaksanaan pendidikan inklusif karena mereka melihat dampak sosial dan sikap terhadap anak-anak mereka terlihat baik meskipun ada beberapa masalah terkait ketidaknyamanan anak dengan PDBK dan ini dianggap sebagai kasus yang terpisah. Sedangkan untuk layanan pendidikan yang diberikan oleh sekolah, sudah baik. Orang tua peserta didik reguler dan orang tua peserta didik PDBK merasa telah diberikan layanan yang tepat.

Bagi orang tua siswa PDBK pada awalnya mendapat respon yang kurang baik, namun seiring berjalannya waktu dan adanya pemberian pemahaman serta sosialisasi dan edukasi secara langsung dari pihak sekolah kepada orang tua siswa reguler dan seluruh siswa, pada akhirnya semua pihak yang terlibat mengerti dan tidak ada lagi respon yang negatif. Hubungan antar orang tua siswa juga terlihat baik dan saling berkoordinasi dalam setiap kegiatan dan program yang diadakan oleh pihak sekolah. Orang tua siswa juga telah memberikan dukungan dana dengan memberikan sumbangan sukarela untuk memenuhi kebutuhan dana terkait program pendidikan khusus bagi PDBK dan dana tersebut dikelola oleh GPK.

Orang tua juga mengetahui sepenuhnya tentang kegiatan dan program yang dikembangkan di sekolah. Koordinasi antara orang tua, guru, GPK dan kepala sekolah berjalan dengan baik, diketahui bahwa orang tua mengetahui kegiatan anaknya, terlibat dalam pembahasan kurikulum dan program dan guru juga mengetahui perkembangan siswa di rumah melalui orang tua, sehingga guru dan orang tua sama-sama berusaha memberikan pelayanan yang terbaik bagi siswa.

Faktor pendukung dan penghambat

Pelaksanaan pendidikan inklusif tidaklah mudah, terdapat beberapa kendala, namun ada pula dukungan yang diberikan.

Tabel 2. Faktor pendukung dan penghambat

TIDAK	Aspek	Pendukung	Kendala
-------	-------	-----------	---------

1	Pemimpin	Memberikan sosialisasi pemahaman tentang pendidikan inklusif	
		Terbuka terhadap ide-ide untuk mempromosikan pendidikan inklusif Memberikan kesempatan pelatihan bagi guru Kerjasama terbuka dengan pihak luar untuk mendukung pendidikan inklusif	
2	Teman sejawat	Memiliki komunikasi yang baik Dapat berkoordinasi dengan baik Mendukung pelaksanaan pendidikan inklusif Saling membantu Menjadi tempat berdiskusi Memiliki visi yang sama untuk memajukan pendidikan inklusif	
3	SDM	Kompetensi guru dapat diandalkan Latar belakang pendidikan guru yang beragam menjadikan guru sebagai aset untuk mampu memecahkan permasalahan pendidikan di sekolah dilihat dari beberapa bidang ilmu (PGSD, PLB, PAI) Sebagian besar guru memiliki pemahaman yang baik tentang pendidikan inklusif	Pada sekolah yang tidak memiliki GPK yang cukup, guru kelas kewalahan dalam mengelola kelas. Status kepegawaian GPK yang belum memiliki jenjang karir Jumlah GPK belum mencukupi jumlah PDBK dibandingkan dengan mahasiswa reguler. Guru belum mampu mengembangkan PPI Beberapa guru tidak sepenuhnya memahami inklusi
4	Orang tua	Dukungan material dan immaterial Koordinasi yang baik dengan orang tua Kebersamaan orang tua Solidaritas Orang Tua Memiliki tujuan yang sama untuk memajukan mutu sekolah	Harapan orang tua terlalu tinggi/menginginkan anak-anaknya mampu mengikuti pelajaran akademis secara teratur, meskipun tingkat kemampuan akademis anak-anak mereka di bawah rata-rata.
5	Kurikulum	Orang tua terlibat dalam kegiatan sekolah Dikembangkan oleh para ahli EBD Kepala sekolah, guru,	Tidak ada RUU perubahan kurikulum Untuk sekolah yang belum mampu mengembangkan adaptasi kurikulum, tidak ada kurikulum untuk anak berkebutuhan khusus.
6	Sarana dan prasarana	Para ahli dan orang tua terlibat dalam pengembangan PPI	Tidak ada ruang dukungan/ruang sumber daya
		Ruang kelas yang memadai Lingkungan sekolah yang indah	Kontur aksesibilitas sekolah menyulitkan anak-anak dengan hambatan fisik. Fasilitas toilet juga tidak memadai untuk PDBK dengan hambatan fisik.
7	Finansial	Media pengajaran standar (papan tulis, papan kerja, lemari, meja dan	Hanya mengandalkan dana BOS Dana belum sepenuhnya

		bangku standar) Memiliki perpustakaan	mendukung kegiatan/program tertentu Dana sulit untuk menyediakan gaji bagi GPK
8	Kebijakan	Dukungan dari orang tua	Tidak ada kebijakan rinci tentang sistem dukungan pendidikan inklusif Tidak ada penagihan
		Bantuan dari lembaga atau organisasi sosial masyarakat (situasional) Ada payung hukum untuk pendidikan inklusif	atau supervisi untuk dokumen kurikulum PDBK Beberapa kebijakan sulit dilaksanakan, seperti menyediakan sumber daya manusia tanpa pendanaan yang memadai. Tidak ada dukungan keuangan untuk sumber daya manusia.
9	Sekolah Menengah Pertama	Kebijakan pendidikan inklusif pusat dan daerah selaras	Terdapat kendala penerimaan PDBK pada jenjang SMP Beberapa SMP sasaran belum menyelenggarakan pendidikan inklusif
10	Masyarakat		Ada anggapan bahwa sekolah inklusif sama dengan sekolah khusus. Ada orang yang menolak menyekolahkan anak-anaknya di sekolah inklusif karena takut tertular. Belum adanya sosialisasi pendidikan inklusif kepada masyarakat

Sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, akan tetapi masih terdapat faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pendidikan inklusif. Beberapa ahli juga menyoroti beberapa kendala dominan sebagaimana yang sering disampaikan oleh kepala sekolah dan guru, bahwa faktor pendanaan dan keterbatasan sumber daya manusia sering menjadi alasan mengapa suatu sekolah tidak atau belum melaksanakan pendidikan inklusif. Thomas et al (1998) menyebutkan aspek pendanaan sebagai salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam pendidikan inklusif karena lebih mahal. Kebutuhan guru pendamping dimana jumlah peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah tersebut bertambah sedangkan jumlah guru tetap. Pada salah satu sekolah, gaji GPK diperoleh dari orang tua anak berkebutuhan khusus. Minimnya sumber daya manusia dan dana mengakibatkan terbatasnya layanan pendidikan yang dapat diberikan sehingga capaian kurang optimal.

Stubbs (2008, p 72) menyatakan bahwa "kebijakan dapat bersifat mendukung dan juga menghambat". Kepala sekolah dan guru juga menyoroti kebijakan yang ada, ketika kebijakan utama atau payung hukum pelaksanaan pendidikan inklusif sudah ada, namun kebijakan pendukung seperti dana, sumber daya manusia, infrastruktur, kurikulum masih minim dan kemampuan sekolah serta pemerintah daerah untuk melaksanakan kebijakan tersebut belum pasti. Sebagaimana yang dikemukakan oleh GPK dan guru, masih sulit untuk mengembangkan kurikulum yang baik untuk PDBK. Berdasarkan Permendiknas No 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif, kurikulum untuk PDBK dapat dimodifikasi untuk mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan PDBK. Peran pengawas pendidikan juga memengaruhi pengembangan modifikasi kurikulum. Mereka harus memperhatikan fakta bahwa meskipun PDBK tidak berfokus pada akademis, PDBK juga harus memiliki prestasi atau kemajuan dalam

pembelajaran. Status kepegawaian GPK juga menjadi perhatian bersama, baik kepala sekolah, guru, maupun GPK berharap adanya kejelasan tugas dan fungsi, status kepegawaian, dan pengangkatan GPK. Aturan mengenai beban kerja guru diatur dalam Permendikbud No. 15/2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru. Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah.

Barret (2014) menyatakan bahwa visi dan kualitas kepemimpinan yang diberikan oleh kepala sekolah berkorelasi positif dengan keberhasilan siswa. Guru juga menyatakan bahwa dukungan dari kepala sekolah dan kepala dinas pendidikan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan siswa dan peningkatan kualitas pendidikan di sekolah.

Dari faktor pendukung dan penghambat yang ada, baik kepala sekolah, guru, maupun orang tua siswa memberikan rekomendasi untuk pendidikan inklusif ke depannya agar lebih diperhatikan lagi perbaikan dan kejelasan regulasi terkait SDM, sarana prasarana, pendanaan secara keseluruhan agar lebih jelas dan saling mendukung demi kelancaran penyelenggaraan pendidikan inklusif. Mengembangkan kompetensi SDM, serta supervisi dan pengarahan hal-hal yang bersifat teknis di sekolah.

KESIMPULAN

Model implementasi kurikulum di sekolah SDN 206 Putraco Indah pada tahap perencanaan guru kelas menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran yang dituangkan dalam dokumen prota, promes, silabus, dan RPP yang mengacu pada materi dan kemampuan siswa reguler. Pembelajaran untuk PDBK dibantu oleh GPK dengan melakukan penilaian, menyusun prota, dan PPI. Penyelarasan/modifikasi kurikulum dilakukan dengan berdiskusi dengan guru kelas, guru mata pelajaran, orang tua siswa PDBK dan kepala sekolah. Pelaksanaan pembelajaran di kelas, semua siswa dilibatkan, guru mengusahakan PDBK mampu mengikuti dan terlibat dalam proses pembelajaran di kelas, namun bagi PDBK yang memiliki kendala dan tidak memungkinkan untuk mengikuti secara reguler, pembelajaran dibantu oleh GPK. Evaluasi hasil belajar PDBK disesuaikan, guru kelas menyiapkan soal untuk siswa reguler, sedangkan evaluasi PDBK disusun oleh GPK sesuai dengan kemampuan dan kondisi siswa.

Bagi PDBK yang masih memerlukan pendampingan, GPK akan membantu mereka untuk membacakan soal atau mendiktekan jawaban. Bagi PDBK yang secara akademis mampu mengikuti Ujian Nasional, mereka diikutsertakan dalam Ujian Nasional, dan bagi PDBK yang secara akademis di bawah rata-rata, mereka diikutsertakan dalam Ujian Sekolah, tetapi hak untuk mengikuti sekolah negeri sama dengan siswa reguler dengan menggunakan jalur PDBK.

REFERENSI

- Abdurrahman, M. (2012). *Anak Berkesulitan Belajar Teori, Diagnosis, dan Remediasinya*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Ali, M., & Asrori, M. (2014). *Metodologi Dan Aplikasi Riset Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Ansyar, M. (2015). *Kurikulum Hakikat, Fondasi, Desain Dan Pengembangan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Arifin, Z. (2014). *Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Bakken, JP, & Obiakor, FE (2016). Inklusi dalam Pendidikan Umum dan Khusus di Era Perubahan: Kesimpulan. *Inklusi Pendidikan Umum dan Khusus di Era Perubahan: Peran Profesional yang Terlibat Kemajuan dalam Pendidikan Khusus*, 32, 179-185.
nomor telepon:10.1108/S0270401320160000032011
- Barret, D. (2014). *Pendanaan Pendidikan Inklusif. Pengukuran Pendidikan Inklusif*, 75-91.
doi:10.1108/S1479-363620140000003020
- Berlian, IN (2016). *Evaluasi Implementasi Kurikulum Sekolah Dasar Inklusi (Studi Evaluatif di SD Hikmah Teladan Kota Cimahi)*. S2 Tesis. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.

- Borders, C., Woodley, S., & Moore, E. (2014). Inklusi dan Kecerdasan. Pendidikan untuk Anak Berbakat: Perspektif dan Isu Terkini, Vol 26, 127-146.
- Bourke, PE (2010). Reformasi Pendidikan Inklusif di Queensland: Implikasi bagi Kebijakan dan Praktik. Taylor & Francis: Jurnal Internasional Pendidikan Inklusif, 183-193.
- Bungin, HB (2013). Metodologi Penelitian Kuantitatif. Jakarta: Kencana. Catagnus, RM, & Hantula, DA (2011). Tim Rencana Pendidikan Virtual (IEP): Menggunakan Kolaborasi Daring untuk Mengembangkan Rencana Intervensi Perilaku. Internasional E-Kolaborasi, 7(1),30-46.
nomor telepon:10.4018/jec.201101010
- Davis, M., & Karunathilake, I. (2004). Kurikulum Adaptif. Taylor & Francis: Guru Kedokteran, Vol 26, No 6, 501-503.
- Dean, J. (1996). Mengelola Kebutuhan Khusus di Sekolah Dasar. London: Routledge. 135
- Deklarasi Bandung Pada Tanggal 8-14 Agustus 2004 Tentang Indonesia Menuju Inklusif. Deklarasi Salamanca (UNESCO) tahun 1994 .
- Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus Dan Layanan Khusus. (2013). Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. Jakarta: Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus Dan Layanan Khusus.
- Farid, A. (2010). Pengembangan Pembelajaran Inklusi Model Kelas Reguler Dengan Pull Out Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Slow Learner Dalam Mata Pelajaran Bahasa Indonesia. Tesis. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Garnida, D. (2015). Pengantar Pendidikan Inklusif. Bandung : PT Refika Aditama.
- Giangreco, MF, Baumgart, D., & Doyle, MB (1995). Bagaimana inklusi dapat memfasilitasi pengajaran dan pembelajaran. Intervensi di Sekolah dan Klinik, 30, 273-278.
- Glatthorn, AA, Boschee, F., Whitehead, BM, & Boschee, BF (2012). Strategi Kepemimpinan Kurikulum untuk Pengembangan dan Implementasi. Amerika Serikat: SAGE Publications, Inc.
- Hakim, L. (2011). Studi Kasus Tentang Pelaksanaan Pembelajaran Di Kelas 5 Sd Inklusi X Dan Y Kota Bandung. tesis S2. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Hamalik, O. (2013). Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
<http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pengabdian/dr-sari-rudiyatimpd/kurikulum-adaptif-di-sekolah-inklusif.pdf>. (2018, 10 Januari).
- http://www.jabarprov.go.id/index.php/news/14556/Bandung_Deklarasikan_Kota_Pendidikan_Inklusif. (2018, 14 April).
- <http://www.pdst.ie/sites/default/files/Team%20Teaching%20Seminar%20final.pdf>. (2018, 12 Maret).
- <https://www.depok.go.id/11/12/2012/04-pendidikan-kota-depok/deklarasi-sebagai-kota-penyelenggara-pendidikan-inklusif>. (2018, April 13)
- Lancaster, J. (2014). Indikator Sekolah dan Ruang Kelas Pendidikan Inklusif. Perspektif Internasional tentang Pendidikan Inklusif, 3, 227-245. doi:10.1108/S1479-363620140000003027
- Miller-Day, M., Pettigrew, J., Hecth, ML, Shin, Y., Graham, J., & Krieger, J. (2013). Bagaimana kurikulum pencegahan diajarkan dalam kondisi dunia nyata: Jenis dan alasan untuk adaptasi kurikulum guru. Pendidikan Kesehatan, 113, 324-344. doi:10.1108/09654281311329259
- Moleong, LJ (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif:Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mudjito, Elfindri, Harizal, & Riduan, R. (2014). Pendidikan Layanan Khusus: Model-model dan Implementasi. Jakarta: Media Baduosa.

- Oliva, Peter F & Gordon, William. (2013). Mengembangkan Kurikulum Edisi Kedelapan. Amerika Serikat: Pearson Education.
- Ornstein, A., & Hunkins, F. (2013). Landasan, Prinsip, dan Isu Kurikulum: Edisi Keenam. Amerika Serikat: Pearson Education, Inc.
- Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah No. 10/D/KR/2017 Tentang Struktur Kurikulum Pendidikan Khusus.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 20 Tahun 2016 Tentang Standar Kompetensi Lulusan.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 21 Tahun 2016 Tentang Standar Isi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 23 tahun 2016 Tentang Standar Penilaian.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 24 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Kurikulum 2013 Tentang KI dan KD Kurikulum 2013.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa.
- Pratiwi, LD (2014). Penilaian Hasil Belajar Matematika Di Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif. *Jurnal Pendidikan Khusus Fakultas Ilmu Pendidikan UNJ*, 03, No 2, 1-8.
- Rahmawati, E. (2014). Kompetensi Guru Reguler dalam melayani ABK di Sekolah Dasar . Tesis UPI.
- Rudiyati, S. (2010). Pengembangan dan Pengelolaan Program Pendidikan Individu "Individualized Educational Program"/IEP Bagi Anak Berkelainan Di Sekolah Inklusif. *Jurnal Pendidikan Khusus FIP UNY*, 6, No 1, 54-64.
- Rudiyati, S. (2010). Pengembangan Dan Pengelolaan Program Pendidikan Individu Bagi Anak Berkelainan Di Sekolah Inklusif. *Jurnal Pendidikan Khusus UNY*, Vol. 6. No.1, 54
- Rusman. (2012). Manajemen Kurikulum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Rusman. (2015). Pembelajaran Tematik Terpadu Teori, Praktik, dan Penilaian. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Rusman. (2017). Belajar dan Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan. Jakarta: Kencana.
- Sanjaya, W. (2008). Kurikulum dan Pembelajaran : Teori dan Praktik Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Jakarta: Kencana.
- Sanjaya, W., & Andayani, D. (2016). Komponen-komponen Pengembangan Kurikulum. Dalam Tim Pengembang MKDK Kurikulum dan Pembelajaran, Kurikulum dan Pembelajaran (hal. 45-61). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sauri, S. (2010). Filsafat Ilmu Pendidikan Keagamaan. Bandung : CV. Arvino Raya. Skjorten, MD (2001). Pendidikan-Pendidikan Berkebutuhan Khusus Suatu Pengantar. Oslo: Unipubforlab.
- Smaldino, SE, Russel, JD, Heinich, R., & Molenda, M. (2005). Media Pembelajaran dan Teknologi untuk Pembelajaran. New Jersey: Englewood Cliffs.
- Smith, DJ (2015). Sekolah untuk Semua Teori dan Implementasi Inklusi: Terjemahan. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Spain, D., Sin, J., Harwood, L., Mendez, MA, & Happé, F. (2017). Terapi perilaku kognitif untuk kecemasan sosial pada gangguan spektrum autisme: tinjauan sistematis. *Kemajuan dalam Autisme*, 3(1) , 34 - 46. doi:10.1108/AIA-072016-0020
- Suhendar. (2017). Kurikulum Pembelajaran dalam Setting Kelas Inklusi. *ICSAR ke-7* (hal. 133-139). Malang : Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Malang.
- Sukirman, D., & Asra. (2016). Landasan Pengembangan Kurikulum. Dalam Tim Pengembang MKDP Kurikulum dan Pembelajaran, Kurikulum dan Pembelajaran (hal. 15-44). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sunardi, & Sunaryo. (2011). Manajemen Pendidikan Inklusif. *JASSI Vol. 10. No.2*.